**THE NATIONAL INTEREST OF RUSSIA IN BUILDING NATION BRANDING
THROUGH ORGANIZING THE 2018 WORLD CUP**

**By : Nazaretha Tambun
Email : nazarethatambun@gmail.com
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430**

ABSTRACT

This research describes Russia's interest in the 2018 FIFA World Cup. The World Cup is a sporting event that is highly awaited by many people because football is a popular sport around the world. Many countries are reaping the pros and cons of the 2018 FIFA World Cup held by Russia, especially the ability of Russia to become the host mega sports events.

This research was conducted by using a library research method where data and information were obtained from relevant sources of the problems by this research. The study will be analyzed with the perspective of realism, the theory of Jackson & Sorensen. The concept of national interest was brought by Donald E. Nuechterlein. The results of the research show that Russia has a national interest to be achieved by hosting the 2018 FIFA World Cup.

In terms of economy, The Russian government hopes that Russia will achieve the interests of either profit or revenue from tourist visits during the world cup and make Russia be a tourist destination of the country. In terms of politics, the government wants to increase the prestige of the country successfully. This opportunity was also used by the President of Russia, Vladimir Putin to improve his good image during his tenure in Russia.

Keywords : National Interest, World Cup, FIFA, Russia

Pendahuluan

Piala Dunia yang dilaksanakan di Rusia merupakan salah satu acara besar yang kontroversial, terutama upaya aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014 dan eskalasi konflik militer berikutnya di Ukraina Timur antara kaum nasionalis Ukraina dan separatis pro-Rusia yang juga didukung oleh Rusia di mana memiliki dampak yang bertahan lama pada hubungan internasional Rusia. Tindakan Rusia di Ukraina telah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan keamanan Eropa dan internasional oleh Uni Eropa (UE) dan mempertanyakan prinsip-prinsip penting hubungan internasional, seperti penghormatan terhadap integritas teritorial. Intervensi militer tersebut memicu sanksi oleh Amerika Serikat dan UE, antara lain termasuk larangan bepergian terhadap individu dan badan hukum, larangan transaksi bisnis, serta embargo perdagangan senjata. Terlepas dari reaksi politik UE, aneksasi Krimea telah memperkuat representasi negatif dan stereotip Rusia di Barat dan bahkan mengaktifkan kembali citra musuh Perang Dingin Rusia. Apalagi, Rusia memulai melakukan intervensi militer di Suriah pada September 2015 setelah permintaan resmi dari pemerintah Suriah untuk bantuan militer. Sementara negara-negara Barat telah mencoba untuk mendukung faksi-faksi oposisi anti-pemerintah, di mana intervensi Rusia menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemerintah Suriah tetapi disertai dengan tuduhan korban sipil dan kejahatan perang. Konflik ini meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Barat.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Spring Pew Global Attitudes Survey di 44 negara terkait Russia's Global Image Negative, krisis

yang terjadi di Ukraina berdampak buruk pada Image Rusia di mata dunia. Persentase median menunjukkan bahwa 43% memiliki pandangan tidak baik tentang Rusia, dibandingkan dengan 34% yang positif. Peringkat negatif Rusia telah meningkat secara signifikan sejak 2013. Masyarakat Amerika dan Eropa telah memberikan respon negatif terhadap image Rusia hal ini tentunya juga berdampak pada sikap Ukraina terhadap Rusia juga telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Enam dari sepuluh masyarakat Ukraina menilai Rusia kurang baik saat ini, dibandingkan dengan hanya 11% pada tahun 2011, saat terakhir kali pertanyaan diajukan.

Track record Rusia tersebut, berdampak pada respon yang diberikan oleh beberapa politisi Barat, LSM, dan 60 anggota parlemen Eropa yang menyerukan boikot Piala Dunia di Rusia yang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun, tidak ada tim nasional yang memboikot turnamen tersebut, bahkan beberapa politisi Barat mengunjungi Rusia. Hanya beberapa pemerintah, termasuk Islandia dan Inggris Raya, yang secara resmi mengumumkan bahwa tidak ada perwakilan pemerintah atau negara bagian yang akan ambil bagian dalam Piala Dunia. Namun demikian, tuntutan boikot menunjukkan bahwa acara olahraga besar mungkin tidak hanya berfungsi sebagai acara potensial untuk membangun Image atau pencitraan negara.

Acara olahraga besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia FIFA banyak digunakan oleh negara tuan rumah untuk menampilkan diri mereka kepada dunia menciptakan dan menyampaikan citra nasional yang positif bagi penonton domestik dan global. Citra ini mampu menyampaikan makna dan nilai-nilai

tentang apa yang mungkin dipertahankan suatu bangsa, dan dengan demikian hal ini dapat menambah normativitas dan daya tarik positif bagi konsep bangsa. . Justru karena penciptaan makna dan nilai publik inilah, penyelenggaraan acara mega sport dikaitkan dengan strategi soft power. Selain itu, mereka diharapkan untuk memperkuat keterikatan bangsa di antara penduduk suatu negara serta meningkatkan legitimasi elit politiknya.

Keterlibatan pribadi Vladimir Putin dalam Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014 dan strategi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 membuktikan bahwa promosi olahraga massal adalah tujuan dan prioritas utama bagi Rusia. Karena Olimpiade di Sochi tidak berjalan seperti yang dibayangkan, Piala Dunia 2018, yang bisa dibilang sebagai acara olahraga terbesar di dunia, dipandang sebagai kesempatan lain untuk memamerkan status kekuatan besar Rusia dan menumbuhkan kebanggaan nasional. Membawa kembali ide “sport diplomacy as a two-level game” menargetkan penonton internasional dan domestik secara bersamaan. Piala Dunia dirancang untuk memperkuat legitimasi domestik Putin dan untuk menciptakan ekonomi peluang bagi para pemilih domestiknya sendiri. Di satu sisi, Putin telah mencoba untuk menempa rasa persatuan dan tujuan nasional di atas nostalgia untuk pencapaian Soviet melalui olahraga. Olahraga menjadi arena non-kontroversial di mana setiap orang dari populasi etnis campuran dapat merayakan bersama. Memang, performa dan perkembangan tim yang bagus di Piala Dunia memberikan alasan bagi negara untuk merayakannya, dan yang terpenting menanamkan rasa bangga nasional, meski pada kenyataannya tim Rusia kalah di perempat final dari Kroasia.

Peneliti melihat bahwa Rusia tidak hanya sekadar menyelenggarakan Piala Dunia FIFA 2018 sebagai suatu acara turnamen olahraga, sebagai aktor rasional, usaha yang dilakukan oleh Rusia hingga berhasil mengambil kesempatan sebagai tuan rumah Piala dunia tentu dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional,

Piala Dunia dapat menjadi alat diplomasi dalam mencapai kepetingan tersebut, khususnya dalam membangun Positive Image Rusia di mata Internasional. Berdasarkan pada latar belakang di atas, pertanyaan penelitiannya adalah **“Apa Kepentingan Nasional Rusia dalam Membangun National Branding melalui Penyelenggaraan Piala Dunia 2018”**

Tujuan penelitian untuk “Mengetahui kepentingan Rusia dalam Membangun Image Positif dalam Penyelenggaraan Piala Dunia 2018 dan bagaimana upaya Rusia memaksimalkan diplomasi publik pada kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan dan mengeksplorasi sebuah kasus sosial di mana peneliti berupaya menerjemahkannya kedalam sebuah gambaran yang kompleks dan menginterpretasikan dalam bentuk kata-kata dan menghasilkan sebuah laporan secara detail dan menyeluruh. Dalam penelitian ini juga peneliti menginterpretasikan dalam bentuk deskripsi yang jelas terkait isu dan respon yang terjadi di lapangan. Penulisan ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana penulis menjadi instrumen utama untuk

pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data, serta sangat memfokuskan perhatian pada proses dan arti dari suatu peristiwa yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka penulisan dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, pengolahan data dan penulisan laporan penelitian.

Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif naratif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kelebihan penggunaan metode kualitatif adalah deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam, penelitian dapat berjalan efektif untuk mencari tanggapan dan pandangan terhadap permasalahan, bersifat lebih fleksibel terhadap analisis dengan temuan di lapangan. Pada studi Ilmu Hubungan Internasional dasar utama dari metodologi penelitian kualitatif difokuskan pada metode studi komparatif dan case study dari perspektif positivistic. Pada studi Hubungan Internasional juga dijelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah penjelasan hasil pada kasus individual.

Pembahasan

Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan Utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.125.200 km², Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup seperdelapan luas daratan bumi. Penduduknya menduduki peringkat kesembilan terbanyak di dunia dengan mencakup sekitar 146 juta jiwa (Maret 2016). Wilayahnya membentang sepanjang Asia Utara dan sebagian Eropa Timur, Rusia memiliki zona waktu dan wilayahnya terdiri dari berbagai tipe lingkungan dan tanah.

Pada abad ke-18, negara ini berkembang luar biasa melalui penaklukan, aneksasi dan penjajahan menjadi kekaisaran Rusia yang merupakan kekaisaran terbesar ketiga dalam sejarah, memanjang dari Polandia di Eropa hingga Alaska di Amerika Utara. Ekonomi Rusia menempati peringkat ke-12 terbesar menurut PDB nominal dan keenam terbesar menurut keseimbangan kemampuan berbelanja tahun 2015. Sumber daya energi dan mineral Rusia terbesar di dunia, menjadikannya produsen minyak dan produsen gas alam utama dunia. Negara ini adalah salah satu dari lima negara senjata nuklir yang telah dikenal dan memiliki cadangan senjata pemusnah massal terbesar di dunia.

Rusia merupakan negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga anggota dari G20, Dewan Eropa, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSEC), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), anggota utama Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), Collective Security Treaty Organization (CSTO) dan satu dari lima anggota Uni Ekonomi Eurasia, bersama dengan Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan.

Upaya Rusia Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2018

Piala Dunia FIFA 2018 menjadi Piala Dunia FIFA yang ke-21, turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang diikuti oleh tim nasional pria asosiasi anggota FIFA. Tahapan pemilihan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018 dan 2022 dimulai sejak 2009, di mana asosiasi nasional memiliki waktu

hingga 2 Februari 2009 untuk mendaftarkan diri. Pada awalnya, tujuh negara mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018, tetapi Meksiko kemudian mengundurkan diri, sementara penawaran Indonesia ditolak oleh FIFA pada Februari 2010 karena pemerintah Indonesia gagal mengirimkan surat dukungan penawaran.

Selama proses pemilihan, negara-negara non-UEFA (Australia, Jepang dan Amerika Serikat) secara bertahap mundur dari pemilihan tuan rumah edisi 2018, sementara negara-negara UEFA mundur dari pemilihan tuan rumah edisi 2022. Dengan begitu, maka tersisa empat penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2018, yaitu: Inggris, Belanda/Belgia dan Spanyol/Portugal.

Dua puluh dua anggota Komite Eksekutif FIFA bertemu di Zurich pada 2 Desember 2010 untuk memberikan suaranya dalam memilih tuan rumah kedua edisi turnamen tersebut. Rusia memenangi pemilihan tuan rumah bersama Belgia/Belanda yang menempati urutan ketiga.

Penawaran Inggris untuk menyelenggarakan Piala Dunia yang keduanya gagal di putaran pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, seluruh negara yang memenuhi syarat-209 asosiasi anggota FIFA kecuali tim tuan rumah Rusia yang lolos secara otomatis-mengikuti proses kualifikasi.

Penyelenggaraan Piala Dunia 2018 oleh Rusia

Piala Dunia FIFA (FIFA World Cup) atau sering disebut Piala Dunia saja, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional (Federation International de Football Association,

FIFA), badan pengatur sepak bola dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap empat tahun sekali sejak turnamen 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946, yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II.

Piala Dunia merupakan ajang perlombaan sepak bola paling bergengsi ini memang paling ditunggu oleh penduduk dunia. Digelar setiap empat tahun sekali di berbagai negara sebagai tuan rumah. Piala Dunia mempertemukan negara-negara dari lima benua yang ada di dunia, sehingga penyelenggaraan ini sangat dinantikan karena merupakan acara internasional yang sangat besar dan sangat digemari oleh masyarakat luas yang ada di belahan dunia.

Ketika Rusia, pada 2009 memproklamkan bahwa mereka tertarik untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, para petinggi mereka dengan lantang menegaskan bahwa dana sebesar 10 Miliar dolar AS siap digelontarkan untuk mengelat turnamen empat tahunan itu. Kini tiba waktunya tongkat estafet diberikan kepada Rusia. Turnamen Piala Dunia ini diselenggarakan di Rusia pada 14 Juni hingga 15 Juli 2018, setelah negara tersebut terpilih sebagai tuan rumah pada 2 Desember 2010. Edisi Piala Dunia ini menjadi yang pertama digelar di Eropa sejak edisi 2006 di Jerman.

Persiapan penyelenggaraan event besar ini, Rusia siap untuk melakukannya. Namun bukan berarti semua persiapan itu berjalan dengan lancar dan muda. Sebagai negara yang tergabung dalam BRICS atau kumpulan-kumpulan negara yang industrinya tengah berkembang, jumlah uang sebanyak itu bukanlah masalah bahkan Rusia telah menunjukkannya dengan menggelar

Olimpiade Prix Formula 1 pada tahun yang sama. Kesempatan sebagai tuan rumah ini menghidupkan kembali harapan Rusia untuk memulihkan kejayaannya dalam sepak bola. Sebagai tuan rumah turnamen FIFA, Rusia langsung berbenah. Mereka menyiapkan diri sebaik mungkin, memperbaiki segala infrastruktur, semata agar Piala Dunia yang akan dihelat berlangsung dengan baik.

Secara dana, total mereka sudah menghabiskan 12 miliar dolar AS dalam rangka persiapan menjelang Piala Dunia 2018 tersebut. Tidak hanya itu saja, negara tersebut juga melibatkan pihak keamanan agar Piala Dunia jauh dari isu-isu miring yang berpotensi membahayakan, seperti hooliganisme dan terorisme. Pada 2010 silam, Putin yang saat itu memiliki jabatan sebagai Perdana Menteri Rusia berupaya begitu keras agar FIFA mau menerima Rusia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Meski harus bersaing dengan Inggris kala itu, Rusia tidak takut. Mereka tetap maju, hingga akhirnya sukses mengalahkan Inggris dalam proses bidding tuan rumah Piala Dunia 2018 tersebut.

Publikasi yang dilakukan oleh Rusia terkait dengan persiapan Piala Dunia 2018 adalah dengan hadirkan wajah segar di tengah isolasi global. Toko di Moscow dihiasi dengan bola-bola raksasa menyambut Piala Dunia 2018 di Moscow, Rusia. “Ungkapan jangan campur adukkan politik dan olahraga’ sering terdengar di jalan-jalan Moscow”.Selagi pertandingan berlangsung di Rusia, negara itu masih terkena berbagai sanksi internasional atas aneksasi dan invansinya terhadap Krimea dan Ukraina. Presiden Rusia Vlandimir Putin memandang Piala Dunia sebagai kesempatan untuk mematahkan isolasi tersebut dan menyajikan citra lain Rusia kepada Dunia.

Kepentingan Nasional Rusia

Menjadi penyelenggara acara internasional seperti Piala Dunia merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi suatu negara. Hampir setiap negara mulai dari negara maju hingga negara berkembang tentunya akan membenah diri untuk dapat menerima kesempatan ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia. Penyelenggaraan Piala Dunia bagi suatu negara adalah suatu kesempatan negara tersebut untuk menjual negaranya ke dunia internasional dan dapat membuka pintu keuntungan besar setelah penyelenggaraan Piala Dunia usai. Melihat sisi keuntungan yang akan didapatkan oleh suatu negara dari acara penyelenggaraan Piala Dunia, membuat hampir seluruh negara di didunia berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah dari acara besar tersebut.

Berkaca dari situasi Rusia terlebih sejak peristiwa Krimea dan hubungan Rusia-Ukraina, citra Rusia di mata masyarakat dunia juga mengarah ke persepsi negatif.

Masih dari Pew Research Center, ditemukan data bahwa 19 negara dari 37 negara yang disurvei memiliki pandangan negatif terhadap Rusia. Sebesar 40% responden melihat Rusia secara negatif dan 34 % di antaranya memandang Rusia dengan positif. Terlepas dari beberapa negara yang memiliki pandangan negatif terhadap Rusia, adalah sebuah kesempatan jika Rusia menggunakan Piala Dunia 2018 sebagai langkah soft power dalam menepis stereotipdari negara-negara oposisinya.

Rusia dapat menggunakan kesempatan penyelenggaraan Piala Dunia 2018 sebagai soft power untuk kepentingan nasionalnya saat itu. Soft power didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui ketertarikan

daripada paksaan atau pembayaran, dengan demikian soft power sangat kontras dengan hard power, seperti aksi militer atau insentif ekonomi untuk tujuan yang mendasarinya.

Dilihat dari beberapa fenomena dahulu, sport diplomacy menjadi salah satu bagian dari soft power memiliki keberhasilan dalam mencapai kepentingan nasional tuan rumah penyelenggaranya. Sport diplomacy merupakan bentuk soft power yang bersifat memujuk dan tidak memaksa.

Sebagai alat soft power, diplomasi olahraga adalah pokok penting kebijakan luar negeri dan digunakan oleh kekuatan besar atau kekuatan menengah. Diplomasi olahraga memiliki banyak bentuk. Olimpiade atau Piala Dunia memiliki peran besar dalam sport diplomacy ini. Olahraga, jelas berkontribusi sebagai citra atas dasar kualitas pembangunan negara, yaitu menimbulkan kebanggaan domestik di sebuah negara pencapaian tim dan dengan memproyeksikan identitas tertentu di panggung internasional.

Olahraga juga berfungsi sebagai bagian dari sumber budaya dari soft power sebuah negara, bersama dengan pertukaran budaya yang lebih luas (pengetahuan, bahasa, kesenian) antar negara. Perhelatan olahraga yang besar mampu menarik perhatian miliaran orang di seluruh dunia dan menjadi plat-form yang sempurna untuk memamerkan negara tuan rumah, budaya dan citra negara tersebut kepada dunia internasional. Sport diplomacy membuat negara menjadi aktor kunci untuk mencapai national interest, dan kehadiran FIFA (terkhusus sepak bola) untuk menjadi agen atau fasilitator para aktor negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan soft power-nya melalui diplomasi olahraga.

Penyelenggaraan olahraga dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan Rusia dalam hal menunjukkan eksistensinya dengan tujuan mendapatkan pengakuan internasional. Melalui penyelenggaraan olahraga ini, Rusia dapat memperluas marketing power-nya, serta kepentingan-kepentingan lainnya dan memberikan feedback atas stereotip maupun pandangan negatif suatu negara terhadapnya melalui citra yang berbeda dari sebelumnya.

Pandangan Dunia Terhadap Upaya Pencitraan Rusia

Terpilihnya Rusia pada 2 Desember 2010 sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2018, menunjukkan Rusia ini disampaikan Presiden FIFA Joseph Blatter di Zurich, Swiss setelah sidang komite eksekutif FIFA berakhir. Dalam pengambilan suara, Rusia berhasil mengalahkan negara kandidat saingan, Inggris, Spanyol/Portugal dan Belanda/Belgia. Sidang menunjukkan tuan rumah Piala Dunia ini hanya diikuti oleh 22 dari 24 anggota komite eksekutif, menyusul skor yang diberikan kepada dua anggota yang diduga terlibat skandal suap. Penunjukkan tersebut menuai kontroversi, banyak isu dan konflik yang berkembang saat itu. Mulai dari dugaan adanya suap membeli suara, kultur rasialisme yang masih mengakar, propaganda, aneksasi Krimea oleh Rusia dan invansi militer yang menyebabkan konflik di Ukraina.

Dalam definisinya, aneksasi adalah pengambilan wilayah secara paksa wilayah negara lain untuk disatukan dengan wilayah negara sendiri. Aneksasi (annextation) merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperoleh wilayah secara paksa, bisa juga disebut penaklukan. (Sahir) Perolehan kedaulatan teritorial

yang didapat dengan paksaan bisa dalam dua bentuk keadaan:

1) Apabila suatu wilayah yang dianeksasi telah dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang melakukan aneksasi.

2) Apabila suatu wilayah yang dianeksasi kedudukannya sudah berada dibawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

Dari tahun 1783, Krimea merupakan wilayah Kekaisaran Rusia, yang dimasukkan ke dalamnya sebagai Taurida Oblast. Pada tahun 1796, Krimea dilebur masuk ke Kegubernuran Novorossiysk dan pada tahun 1802, daerah ini dipisahkan lagi dan dijadikan Kegubernuran Taurida. Setelah Revolusi Oktober 1917 pada tahap-tahap awal Perang Saudara Rusia, beberapa bentuk pemerintahan yang tidak tahan lama didirikan (Republik Rakyat Krimea, Pemerintahan Daerah Krimea, Republik Sosialis Sovyet Krimea). Namun kemudian bentuk-bentuk pemerintahan ini disusul dengan pemerintahan Rusia Putih (Komando Umum Angkatan Bersenjata Rusia Selatan), lalu Pemerintahan Rusia Selatan dan akhirnya integrasi Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea ke Uni Sovyet. Setelah Perang Dunia 2 dan deportasi suku bangsa Tatar Krimea, status Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea diturunkan derajatnya, otonominya dihapus pada tahun 1946 dan dijadikan sebagai Oblast saja.

Pada tanggal 4 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak punya rencana mencaplok Krimea. Ia mengatakan mengenai semenanjung ini bahwa "hanya warga Krimea dengan persyaratan memiliki hak mengungkapkan keinginan dan keamanan yang bisa menetapkan masa depan mereka". Putin lalu mengaku

bahwa pada bulan Maret awal ada "jajak pendapat rahasia" yang diadakan di Krimea, di mana menurutnya membuah hasil bahwa mayoritas besar penduduk mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia.

Pada tanggal 17 Maret setelah ada pengumuman resmi hasil referendum, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol yang memiliki status istimewa di dalam republik ini. Parlemen Krimea mengumumkan "penangguhan sebagian Undang-undang Ukraina" dan mulai menasionalisasikan beberapa BUMN dan BUHN Ukraina yang terletak di Semenanjung Krimea seperti pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan properti Chornomornaftogaz. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima negara yang baru saja memerdekakan diri ini di Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Krimea secara de facto mengubah namanya menjadi Dewan Negara Krimea dan memutuskan Rubel Rusia sebagai mata uang resmi bersama dengan Hryvnia Ukraina serta mengumumkan Krimea akan mengubah waktunya mengikuti Waktu Moscow (UTC+4) pada 30 Maret.

Secara resmi Putin mengakui Republik Krimea melalui Dekret Presiden dan menyetujui masuknya Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia.

Penggabungan Krimea ke Rusia adalah proses integrasi hampir keseluruhan semenanjung Krimea ke Rusia yang terlaksana pada tahun 2014. Banyak negara di dunia menentanginya dan menyebutnya sebagai aneksasi atau pencaplokan wilayah Krimea yang diklaim Ukraina oleh Rusia. Mulai tanggal 21 Maret 2014 Rusia

memerintah Krimea sebagai dua subjek federal: Republik Krimea dan kota federal Sevastopol. Penggabungan ini terjadi pada puncak kritis dalam Krisis Krimea 2014 yang disebabkan oleh intervensi militer Rusia di Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol pada bulan Maret 2014. Kedua daerah ini sebelumnya merupakan bagian administrasi Ukraina. Pasukan bertopeng hijau tanpa penanda yang diidentifikasi sebagai militer Rusia oleh banyak sumber internasional, menduduki gedung Majelis Tinggi Krimea yang mengakibatkan diangkatnya sebuah pemerintahan pro Rusia pimpinan Aksyonov di Krimea. Proklamasi Kemerdekaan Republik Krimea dan pengadaan sebuah referendum yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Krimea dan disebut oleh seorang wartawan BBC News yang bernama John Simpson sebagai sebuah kudeta yang "luar biasa, cepat dan sebagian besar tanpa pertumpahan darah". Peristiwa ini banyak mengundang kontroversi di banyak kalangan dunia internasional dan dikecam oleh banyak pemimpin dunia pula, begitu pula oleh NATO yang menganggapnya sebagai sebuah pencaplokan ilegal wilayah Ukraina. Hal ini dianggap bertentangan dengan Memorandum Budapes 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang telah ditandatangani Rusia. Selain itu, Pemerintahan Yatsenyuk yang saat itu bertanggung-jawab atas urusan dalam negeri Ukraina menegaskan bahwa dalam proses ini ada tujuh pasal dari Konstitusi Ukraina yang dilanggar, termasuk kewajiban Krimea untuk meminta pemulihan dari Ukraina sebelumnya, sebelum diberikan hak resmi untuk melaksanakan proses yang melampaui hak politik dalam hal ini.

Di sisi lain Rusia mengecam keras bahwa proses integrasi ini dicap sebagai "pencaplokan", karena hal ini "menghina penduduk Semenanjung Krimea" dan menganggap proses ini sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan lalu meminta izin untuk masuk ke Rusia sesuai dengan pemilihan rakyat, yang menurut pendapat Rusia mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara yang lebih besar.

Pada tanggal 15 Maret 2014, sebuah resolusi yang diprakarsai oleh Amerika Serikat diajukan di dalam rapat Dewan Keamanan PBB untuk menegaskan kembali komitmen dewan ini menjaga "kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan keutuhan wilayah Ukraina". Sejumlah 13 anggota dewan mendukung resolusi ini, sementara RRC abstain dan Rusia memveto resolusi ini karena menyatakan bahwa Referendum Krimea 2014 mengenai masa depan Semenanjung Krimea adalah ilegal. Veto Rusia di Dewan Keamanan PBB ini diikuti dengan sebuah referendum yang diadakan secara berhasil pada tanggal 16 Maret 2014 oleh badan legislatif Krimea dan pemerintahan lokal di Sevastopol. Setelah referendum, Republik Krimea memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina sehari sesudahnya, mencari keanggotaan PBB dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Rusia mengakui Krimea sebagai negara berdaulat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan penemuan serta kajian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan bahwa

pada saat Rusia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 tentunya dilatar belakangi oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebut didasari oleh kepentingan utama, kepentingan sekunder dan kepentingan permanen Rusia.

Sejak peristiwa Krimea Rusia pada tahun 2014, Rusia menuai banyak kritik dan pandangan negatif dari berbagai negara. Bahkan di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2016, ratusan orang berdemonstrasi di depan kompleks Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Mereka mengusung berbagai poster dengan tulisan "Putin Go to Hell". Ditingkat global, citra Rusia di mata masyarakat dunia juga mengarah ke persepsi negatif.

Setiap negara pada umumnya berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa penyelenggaraan Piala Dunia pada umumnya dapat dijadikan sebuah pintu gerbang untuk mengenalkan negara tuan rumah ke dunia internasional. Penyelenggaraan tersebut memicu dan mendongkrak sorotan dunia terhadap negara tuan rumah, dengan demikian negara tuan rumah akan menjadi tren-topik di dunia internasional bahkan menjadi perbincangan internasional. Melalui penyelenggaraan dunia internasional tersebut media pers maupun dunia internet akan menggali tentang negara tuan rumah tersebut.

Contoh manfaat yang pernah digunakan dari tuan rumah Piala Dunia ialah "Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela juga pernah menggunakan olahraga sebagai diplomasi publik untuk kepentingan nasionalnya". Usai terpilih sebagai Presiden Afsel pada 1994, Mandela

memiliki tugas berat menyatukan masyarakat kulit hitam dengan kulitputihusai era Apartheid. Mandela kemudian menggunakan Piala Dunia Rugby 1995 di Afsel untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Hasilnya sangat positif. Banyak masyarakat kulit hitam memberikan dukungan bagi timnas rugby Afsel (Springboks), yang mayoritas dikuasai pemain kulit putih. Usai Afsel mengalahkan Selandia Baru di babak final, Mandela kemudian memberi trofi kejuaraan kepada kapten Springboks, Francois Pienaar, yang merupakan pemain kulit putih. Mandela menyerahkan trofi sambil mengenakan kostum nomor punggung 6 milik Pienaar. Dengan menggunakan kostum Pienaar, Mandela ingin memberi contoh bahwa kaum kulit hitam dan kulit putih bisa bersatu. "Ketika peluit panjang di akhir pertandingan babak final berbunyi, negara ini berubah.

Keberhasilan diplomasi olahraga yang dimanfaatkan Nelson Mandela tersebut untuk kepentingan nasional, tentunya dapat menuai keberhasilan untuk kepentingan Rusia dalam mengubah citra negatifnya menurut pandangan beberapa negara di dunia internasional menjadi citra positif yang lebih baik dari sebelumnya.

Melalui penyelenggaraan Piala Dunia 2018 tersebut, Rusia dapat memanfaatkan diplomasi publik melalui Sport Diplomacy untuk memperbaiki citra negaranya. Tidak dipungkiri, olahraga akan selalu berdampingan dengan politik karena olahraga dapat menjadi alat diplomasi. Bahkan setelah penyelenggaraan Piala Dunia tersebut usai, sebagian besar penduduk di dunia telah mengetahui bahwa Rusia adalah negara yang aman untuk dikunjungi. Dari pemahaman tersebut, dengan demikian wisatawan manca negara tidak takut atau khawatir jika ingin

berkunjung dan melakukan perjalanan ke kota-kota yang ada di Rusia. Sebagaimana besar negara-negara yang ada di dunia juga akan membuka pandangan positif tentang Rusia. Hal ini juga akan membuka peluang bagi kepentingan Rusia dan akan meningkatkan Power Marketing Rusia dengan demikian dunia internasional akan percaya bahwa Rusia adalah negara bersahabat dan layak untuk menjadikannya partner baik dibidang politik maupun ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku :

Avgerinos, K. P., 2009. "Russia's Public Diplomacy Effort: What the Kremlin is Doing and Why it's Not Working", *Journal of Public and International Affairs*, 20: 115-131.

Balzer, H. (2015). The Ukraine Invasion and Public Opinion. *Georgetown Journal of International Affairs*, 16(1), 79-93. Retrieved February 25, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/43773670>

Bannelier-Christakis, K. (2016). Military interventions against ISIL in Iraq, Syria and Libya, and the legal basis of consent. *Leiden Journal of International Law*, 29(3), 743-775.

Biersack, J., & O'lear, S. (2014). The geopolitics of Russia's annexation of Crimea: narratives, identity, silences, and energy. *Eurasian geography and economics*, 55(3), 247-269.

Branagan, Paul Michael &Guillanoti, Richard 2014. *Soft Power and Soft Disempowerment: Qatar Global Sports and Football's World Cup Finals*. *Leisure Studies*. Pp. 1-18

Buyse, A. (2018). Squeezing civic space: restrictions on civil society

organizations and the linkages with human rights. *The International Journal of Human Rights*, 22(8), 966-988.

Cameron, I. (2003). UN targeted sanctions, legal safeguards and the European Convention on Human Rights. *Nordic Journal of International Law*, 72(2), 159-214.

Carnelian.,dkk, Strategi Energi Vlandimir Putin dalam Mempertahankan Dominasi Rusia di Negara-negara Baltik, *Jurnal Cakrawala* ISSN 1693628, 1-34

Castro, A. S. (2018). The 2018 FIFA World Cup: The gains and constraints of Russia's soft power of attraction through football and sports. *Public Diplomacy of Rising and Regional Powers*, 3(3), 17-37.

Casula, P. (2015). The Syrian conflict through Russian eyes revisited. *Russian Analytical Digest*, 175, 6-10.

Glanville, Brian (2005). *The Story of the World Cup*. Faber. hlm. 44. ISBN 0-571-22944-1.

Good, R. C. (1960). The National Interest and Political Realism: Niebuhr's" Debate" with Morgenthau and Kennan. *The Journal of Politics*, 22(4), 597-619.

Grigor, I., & Pantti, M. (2021). Visual images as affective anchors: strategic narratives in Russia's Channel One coverage of the Syrian and Ukrainian conflicts. *Russian Journal of Communication*, 1-23.

Grix, J., & Houlihan, B. (2014). Sports mega-events as part of a nation's soft power strategy: The cases of Germany (2006) and the UK (2012). *The British journal of politics and international relations*, 16(4), 572-596.

- Horne, J. D., & Manzenreiter, W. (2004). Accounting for mega-events: forecast and actual impacts of the 2002 Football World Cup Finals on the host countries Japan/Korea. *International review for the sociology of sport*, 39(2), 187-203.
- Johansson, J. K., Ronkainen, I. A., & Czinkota, M. R. (1994). Negative country-of-origin effects: The case of the new Russia. *Journal of International Business Studies*, 25(1), 157-176.
- Klotz, A., Prakash, D., Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative methods in international relations*. Palgrave Macmillan.
- Knott, B., Fyall, A., & Jones, I. (2015). The nation branding opportunities provided by a sport mega-event: South Africa and the 2010 FIFA World Cup. *Journal of Destination Marketing & Management*, 4(1), 46-56.
- Levy, J. S. (2009). Qualitative methods in international relations. In *Millennial reflections on international studies* (pp. 432-454). University of Michigan Press.
- Lim, A., & Tsutsui, K. (2012). Globalization and commitment in corporate social responsibility: Cross-national analyses of institutional and political-economy effects. *American Sociological Review*, 77(1), 69-98.
- March, L. (2012). Nationalism for export? The domestic and foreign-policy implications of the new 'Russian Idea'. *Europe-Asia Studies*, 64(3), 401-425.
- McKeown, T. J. (2005). Models, Numbers and Cases: Methods for Studying International Relations. *Perspectives on Politics*, 3 (02). <https://doi.org/10.1017/s1537592705880156>
- Miller, P. B., & Wiggins, D. K. (Eds.). (2004). *Sport and the color line: Black athletes and race relations in twentieth-century America*. Psychology Press.
- Morgenthau, H. J. (1952). Another "great debate": the national interest of the United States. *The American Political Science Review*, 46(4), 961-988.
- Nahmias-Wolinsky, Y. (2004). *Models, numbers, and cases: methods for studying international relations*. University of Michigan
- Nuechterlein, D. E. (1976). National interests and foreign policy: A conceptual framework for analysis and decision-making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Nye Jr, J. S. (1999). Redefining the national interest. *Foreign Affairs*, 22-35.
- Nygård, H. M., & Gates, S. (2013). Soft power at home and abroad: Sport diplomacy, politics and peace-building. *International area studies review*, 16(3), 235-243.
- Osipova, Y., 2012. *New Russian Public Diplomacy: Conceptualization, Practice and Limitations*. Presented at 2012 ISA Annual Convention, San Diego, California, United States of America. [online] <http://files.isanet.org/ConferenceArchive/d8f26c6d8298478ea6920dfaf0f3aed2.pdf> [diakses 11 Desember 2018].
- Sauer, T. (2017). The origins of the Ukraine crisis and the need for collective security between Russia and the West. *Global policy*, 8(1), 82-91.

Sahir, Irvand.(2019). Aneksasi Rusia Terhadap Krimea Tahun 2014, eJournal Ilmu Hubungan Internasional , 7(1), 043-054 ISSN 2477-2623

Van Herpen, M. H. (2015). *Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy*. Rowman & Littlefield.

Vice, M, 2017. Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia [online]. Dalam <http://www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/> [diakses 10 Oktober 2018].

Williams, M. C. (2005). What is the national interest? The neoconservative challenge in IR theory. *European Journal of International Relations*, 11(3), 307-337.

Wodak, R. (2009). *Discursive construction of national identity*. Edinburgh University Press.

Zheltukhina, E. A. R. M. R., Popova, N. A. K. T. G., & Caselles, C. G. (2018). International media image of Russia: trends and patterns of perception. In *XLinguae*. T. 11, 2, 557.